

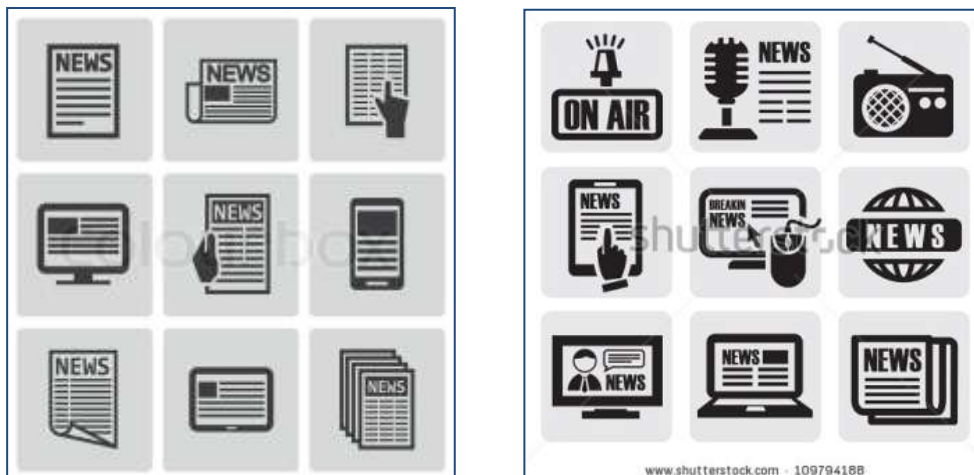


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Senin, 7 Agustus 2017



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta
2017**

Daftar Isi

1. KALTIM SIAP BANGUN JEMBATAN TOL Rp 8,4 T (*Media Online Media Indonesia*)
2. DANA HAJI DISARANKAN KE PROPERTI (*Media Online Republika*)
3. 2018, LRT MASUK TAHAP PENYELESAIAN (*Media Online Republika*)
4. RASIO ELEKTRIFIKASI CAPAI 92,80 PERSEN (*Media Online Republika*)



**MEDIA
INDONESIA**
JUJUR BERSUARA

Harian Umum
Media Indonesia



@Midotcom



Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No. Bebas Pulsa: 08001950990
e-mail: ca@mediaindonesia.com

Senin, 7 Agustus 2017

Kaltim Siap Bangun Jembatan Tol Rp8,4 T

Sentuhan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Bahkan, sejumlah wilayah sudah mulai melakukan persiapan dengan baik.

SYAHRUL KARIM
syahrul@mediaindonesia.com

PEMBANGUNAN jembatan tol sepanjang 5,3 kilometer (km) yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai dilaksanakan pada November mendatang. Nilai proyek tersebut Rp8,4 triliun.

Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan surat persetujuan (clearance) atau tinggi ruang bebas jembatan tol penghubung dari titik Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, menuju Melawai, Kota Balikpapan, setinggi 50 meter dari permukaan air laut tertinggi.

"Dokumen dan izin sudah selesai, terutama yang dari Kemenhub terkait dengan tinggi jembatan tol. Setelah

ini, (pembangunan) akan dilaporkan ke BPJT. Setelah itu, lelang investasi," kata Yusran, kemarin.

Ia mengatakan saat ini sudah ada 14 investor yang siap berpartisipasi dalam pembangunan. "Dari Pak Gubernur disampaikan sudah ada 14 perusahaan. Termasuk yang datang ke PPU empat perusahaan," ujarnya.

Skema pembiayaan pembangunan konsorsium pembangunan jembatan tol penghubung di atas Teluk Balikpapan itu, yakni 55% ditanggung PT Waskita Karya, 25% Pemprov Kaltim, 15% Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 5% Pemkot Balikpapan.

Pembangunan jembatan tol ini akan mempermudah aksesibilitas kedua daerah hingga ke Kalimantan Selatan. Selama ini untuk menjangkau Penajam Paser Utara harus menggunakan feri melalui Pelabuhan Kariangau dengan waktu sekitar 2 jam.

Tol laut

Kemenhub juga tengah menjajaki tol laut di perairan selatan Indonesia. Bahkan, sekarang sudah ada 11 kabupaten di wilayah selatan Jawa mulai Jabar, Jateng, hingga Jatim menggagas konektivitas untuk pengangkutan logistik.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Cilacap memiliki pelabuhan yang cukup besar, yakni Pelabuhan Tanjung Intan. Namun, aktivitas pelabuhan masih didominasi pengangkutan minyak dan batu bara.

"Ke depan, Kemenhub menggagas untuk melakukan pengangkutan logistik sebab lalu lintas logistik dengan kereta api atau angkutan darat lainnya relatif terbatas sehingga tol laut di perairan selatan Jawa menjadi alternatif utama nantinya. Sebagai awal, tahun depan akan mulai diadakan angkutan perintis," tandas Menhub di sela-sela kunjungan di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, kemarin.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengakui kalau pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan 11 Pemkab yang berada di pesisir selatan

Jawa atau pinggir Samudra Hindia. "Ada 11 daerah yang kami ajak kerja sama dan sejauh ini sudah melakukan pertemuan," katanya.

Sementara itu, pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya terus berjalan sesuai dengan jadwal. Direktur PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra memastikan pembangunan ruas tol sepanjang 22 km akan selesai tepat waktu, yakni akhir 2017. Pembebasan lahan untuk proyek itu sudah mencapai 97,68%.

Putra menjelaskan, saat ini progres konstruksi pembangunan tol Palindra sudah mencapai 59,39%. "Kita optimistis pada akhir tahun nanti pekerjaan pembangunan ruas jalan tol ini selesai," katanya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno memberikan apresiasi kepada Hutama Karya dalam menggarap proyek itu mengingat lahan yang akan dimanfaatkan bukan area yang mudah. "Lahan ini kan rawa jadi memang harus divakum. Teknologi ini yang pertama diterapkan Hutama Karya, dan berhasil." (L/D/FL/JI/DW/OL-4)

Pembangunan jembatan tol sepanjang 5,3 kilometer (km) yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai dilaksanakan pada November mendatang. Nilai proyek tersebut Rp8,4 triliun dan Sentuhan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Bahkan, sejumlah wilayah sudah mulai melakukan persiapan dengan baik.

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #JalanTOL #PerhubunganDarat #PelaksanaanProgramNasional
#KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat #KementerianPerhubungan #TOLLaut

REPUBLIKA

SENIN, 7 AGUSTUS 2017

Dana Haji Disarankan ke Properti

● OKD SUPRIYADI

Dana haji hanya akan diinvestasikan ke proyek imbal hasil tinggi.

JAKARTA — Peneliti Institute for Development Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira menyatakan, Pemerintah Indonesia memotivasi Malaysia dalam hal pengelolaan dana haji untuk pembangunan. Akan tetapi, meurut dia, yang perlu diingat, Tabung Haji Malaysia tidak membangun infrastruktur, tapi membangun konstruksi atau real estat dengan imbal hasil yang tinggi.

"Tabung Haji Malaysia membangun aneka properti yang memiliki keuntungan jangka panjang, misalkan, Hotel Tabung Haji di Kuala Lumpur dan Bay Pavilions di Sydney," ucapnya berdasarkan pesan singkat di Jakarta, Ahad (6/8).

Ini menyebutkan, dari total jumlah dana haji Malaysia yang tercatat sebesar Rp 198,5 triliun, sebesar sembilan persen masuk ke konstruksi real estat atau berupa investasi langsung. Sedangkan, 17 persen penempatan dana obligasi juga dimanfaatkan untuk investasi tidak langsung dalam pembangunan properti/konstruksi.

Selain itu, hasil keuntungan dari pengalihan dana haji di Malaysia sebagian kembali lagi ke jamaah haji dalam bentuk subsidi. Data per 2015, misalnya, mengungkap bahwa total subsidi biaya haji mencapai Rp 392,6 miliar.

Ayrıca, tahun dia, jamaah haji di Malaysia membayar Rp 53,7 juta rupiah kemudian diberi subsidi hingga Rp 22,6

juta atau hampir 50 persen dari total biaya. Besarnya dana subsidi yang kembali ke jamaah haji berkaitan dengan performa manajemen investasi Tabung Haji yang mampu meraup pendapatan dari pengelolaan dana hingga Rp 40,4 triliun pada 2015.

Sementara, asyiknya terus meningkat dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 185 triliun. "Properti dampaknya bisa dimakan langsung lagi kemashalatan jamaah haji Indonesia sesuai dengan amanat UU No 34 Tahun 2004," ucapnya.

Selain itu, investasi di bidang infrastruktur juga dianggap berisiko. "Realisasi pembangunan infrastruktur masih sambil persen, artinya risiko infrastruktur cukup besar," ucapnya dalam sebuah diskusi, Ahad (6/8).

Menurut Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, dana haji hanya akan diinvestasikan ke proyek yang aman serta memiliki potensi imbal hasil yang besar. Ia memotivalkan, salah satunya adalah di bidang energi.

Ia mengatakan, salah satu pembangkit listrik yang telah menandatangani kontrak dengan PLN. Saat penyalang listrik itu selesai dan beroperasi, PLN bisa membeli daya listrik yang dihasilkan.

"Jadi, aman karena pemerintahnya sudah dijamin dengan PPA (Power Purchase Agreement) tadi," ucapnya Bambang.

Ia menambahkan, sektor yang bisa digunakan melalui dana haji adalah bandara. Menurut dia, bandara memiliki aktivitas yang cukup padat dan stabil. Sehingga, punya potensi untung dengan jumlah penumpang yang cukup besar.

Ketiga, lanjutnya, adalah proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KSPU) yang sudah disepakati dengan availability payment. Artinya, investor



Menyebutkan, salah satu pembangkit listrik yang telah menandatangani kontrak dengan PLN. Saat penyalang listrik itu selesai dan beroperasi, PLN bisa membeli daya listrik yang dihasilkan.

membangun terlebih dahulu sampai selesai, setelah beroperasi, pemerintah membayar jasa layanan dari infrastruktur tersebut.

"Jadi, ada kepastian pemerintah asyiknya akan membayar infrastruktur dan proyek itu akan menerima pemerintah," tegas Bambang.

Lalu, investasi yang sangat mungkin dilakukan adalah di proyek jalan tol. Iki-

nya jalan yang dilewati oleh banyak kendaraan. Ia meyakini, tak ada kerugian melakukan investasi di sektor tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Luthfi Haniffahudin mengatakan, RPP tersebut saat ini sedang dilakukan dan dipersiapkan. Salah satu yang dikaji dalam RPP tersebut, yaitu mengenai perlu atau tidaknya terdistribusi untuk membatasi kewenangan

yang diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKUH), badan yang mengelola dan mengatur penempatan dana haji.

RPP ini, kata dia, kini masih berada di tangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan sedang dalam harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Keterkurbanam).

■ [@okd_supriyadi](#)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, saat ini pemerintah Indonesia mencontoh Malaysia dalam hal pengelolaan dana haji untuk pembangunan. akan tetapi, menurut pemerintah, yang perlu dicatat, Tabung Haji Malaysia memang tidak untuk membangun infrastruktur, hanya membangun konstruksi atau real estat dengan imbal hasil yang tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengoptimalkan sumber dana yang tersedia

Hashtag Berita :

#KementerianPPN/Bappenas

#PelaksanaanProyekNasional

#Infrastruktur

#PelaksanaanProgramNasional #DanaHaji #Properti #KementerianAgama

REPUBLIKA

SENIN, 7 AGUSTUS 2017

2018, LRT Masuk Tahap Penyelesaian

● RAHAYU SUBEKTI

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, tahun depan proyek Light Rail Transit (LRT) bisa masuk ke tahap penyelesaian. Lalu, awal 2019 bisa selesai dan sudah diuji, paling tidak, Mei 2019 bisa digunakan.

Dengan target tersebut, Luhut yakin, pembangunan LRT bisa menarik investor. "Sekarang saja sudah menarik dengan lihat struktur finansial yang sekarang," kata Luhut di Jakarta, pekan lalu.

Luhut menilai, investor sudah tidak ragu lagi kalau Pemerintah Indonesia bisa mengubah cara penanganan proyek LRT. Sebab, lanjut dia, efisiensi pengeluaran dan *project error-nya* saat ini lebih detail.

Alasan itu yang membuat Luhut yakin investor pasti akan tertarik dengan proyek LRT saat ini. "Kalau begitu *kan* orang mau menaruh duitnya, jadi ada dana macam-macam *lah*," jelasnya.

Tak hanya soal investor, Luhut juga mengatakan, dampak LRT akan berimbas kepada kemacetan di jalan raya. Melalui pembangunan LRT, Luhut yakin, pemerintah juga menjamin kemacetan di Ibu Kota akan terus berkurang karena akses transportasi lainnya lebih mendukung.

Meski diprediksi bisa mengurangi macet,

Luhut menilai, tetap harus disiplin dan juga dibuat *transit oriented development* (TOD) oleh Kementerian Perhubungan. "TOD ini supaya memberi akses bagi orang menyimpan kendaraanya, dia naik bisa di situ. Tapi, apakah bisa mengurangi semuanya? Kalau semua ya tidak, tapi mengurangi saya pikir akan signifikan," jelas Luhut.

Sementara itu, Direktur Operasi Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengungkapkan pembangunan tahap satu LRT, yaitu Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas. "Secara akumulatif, mencapai 17 persen," kata Pundjung di lokasi proyek LRT, pekan lalu.

Dia mengatakan, pembangunan LRT memang akan dilakukan dua tahap. Pembangunan tahap kedua untuk Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.

Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengungkapkan, sejauh ini pembangunan tahap pertama LRT tidak mengalami kendala. Ia menjelaskan, semua lahan yang dibutuhkan sudah dibebaskan dan selesai pada September 2017.

Budi menegaskan, semua lahan-lahan milik pemerintah juga sudah dikerjakan semua. "Sebagian besar sudah ada persetujuan, tinggal proses administrasinya saja," tutur Budi.

■ edri ichsan emraid alamisyah

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, tahun depan proyek Light Rail Transit (LRT) bisa masuk ketahap penyelesaian. Lalu, awal 2019 bisa selesai dan sudah diuji, paling tidak, Mei 2019 bisa digunakan. Dengan target tersebut, Pemerintah yakin, pembangunan LRT bisa menarik investor. Sekarang saja sudah menarik dengan lihat struktur finansial yang sekarang. Pemerintah menilai, investor sudah tidak ragu lagi kalau Pemerintah Indonesia bisa mengubah cara penanganan proyek LRT. Sebab, efisiensi pengeluaran dan *project error-nya* saat ini lebih detail. Alasan itu yang membuat Pemerintah yakin investor pasti akan tertarik dengan proyek LRT saat ini.

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #TransportasiMassal #PerhubunganDarat #PelaksanaanProgramNasional #KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat #KementerianPerhubungan #LRT

Rasio Elektrifikasi Capai 92,80 persen

JAKARTA — Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat rasio elektrifikasi pada semester I tahun 2017 ini mencapai 92,80 persen. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andi Someng mengatakan, rasio elektrifikasi pada semester I ini melebihi dari target yang semula dipasang sebesar 92,75 persen.

Andi menjelaskan, pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan APBN, target yang dipasang pada 2017 ini memang 92,75 persen. Ia pun berharap rasio elektrifikasi bisa sampai 93 persen pada akhir tahun nanti.

Sedangkan, untuk realisasi pembangunan pembangkit pada semester I tahun ini mencapai 1.361 megawatt. Andi mengatakan, pihak kementerian bersama PLN masih akan mengejar target yang dipasang pada tahun ini sebesar 2.688 megawatt.

"Target rasio elektrifikasi ini sinergi dari BUMN dan swasta untuk mengoptimalkan listrik. Kita mengoptimalkan sumber daya setempat, mendukung *sustainable energy*," ujar Andi di Kementerian ESDM, Jumat (4/8).

Andi menjelaskan, ketersediaan pasokan listrik ini juga sejalan dengan tingkat konsumsi masyarakat. Kementerian ESDM mencatat, konsumsi listrik sampai semester I tahun ini mencapai 978,74 kWh per kapita. Angka ini masih di bawah dari target yang sebesar 1.058 kWh per kapita pada 2017 ini.

"Dari sisi konsumsi, kita tahu kondisi kita level penggunaan listrik masih relatif rendah. Target di 2017 adalah 1.058 kWh per kapita. Sampai semester I sudah mencapai 978,74 kWh per kapita. Ke depan, kita sedang mendorong untuk peningkatan konsumsi ini," ujar Andi.

Ia juga menambahkan, saat ini implementasi dari Permen Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penerimaan Elektrifikasi di Pedesaan sudah mulai diminati oleh pihak swasta. Ia mengatakan, beberapa perusahaan dari luar sudah mencoba melakukan kajian di berbagai daerah di Indonesia.

Andi menjelaskan, ada perusahaan asal Amerika yang melakukan kajian potensi sumber daya di Papua. Selain itu, setidaknya ada 20 perusahaan yang sedang mencari konsesi dan mencoba mengkaji potensi daerah.

Andi menjelaskan, di Permen Nomor 38 Tahun 2017 menyatakan bahwa perlu adanya dorongan peningkatan investasi untuk bisa menambah rasio elektrifikasi di pedesaan. Andi mengatakan, pihaknya sudah mendorong gubernur daerah untuk melakukan lelang pengelolaan wilayah usaha.

Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan pengusutan kepada kepala daerah untuk bisa menugaskan BUMD melakukan investasi listrik dengan sumber daya energi baru terbarukan (EBT).

Sementara itu, untuk menggenjot realisasi pemanfaatan EBT, Dewan Energi Nasional (DEN) menilai pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang ramah dan mendukung terciptanya investasi EBT ke depan. Menurut anggota DEN, Rinaldy Dalimi, regulasi harus bisa mendorong mekanisme pasar sehingga pasar juga bergerak untuk memanfaatkan EBT.

Rinaldy menjelaskan, regulasi yang tepat bisa mendorong pemanfaatan EBT sehingga target 2025 terkait implementasi EBT bisa terrealisasi. Ia menjelaskan, regulasi yang ramah untuk dunia usaha menjadi nilai penting.

■ **ed**: utuar: kreatif: alimiyah

RASIO ELEKTRIFIKASI CAPAI 92,80 PERSEN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat rasio elektrifikasi pada semester I tahun 2017 ini mencapai 92,80 persen. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andi Someng mengatakan, rasio elektrifikasi pada semester I ini melebihi dari target yang semula dipasang sebesar 92,75 persen. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan APBN, target yang dipasang pada 2017 ini memang 92,75 persen. Ia pun berharap rasio elektrifikasi bisa sampai 93 persen pada akhir tahun nanti. Sedangkan, untuk realisasi pembangunan pembangkit pada semester I tahun ini mencapai 1.361 megawatt. Andi mengatakan, pihak kementerian bersama PLN masih akan mengejar target yang dipasang pada tahun ini sebesar 2.688 megawatt. Kemudian target rasio elektrifikasi ini sinergi dari BUMN dan swasta untuk mengoptimalkan listrik. Kita mengoptimalkan sumber daya setempat, dalam mendukung *sustainable energy*

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #RPJMN #PLN #BUMN
#MoneterKeuanganNegara
#KelistrikanNasional #35.000MW
#KetahananListrikNasional
#PelaksanaanProgramNasional
#KementerianEnergidanSDM
#PelaksanaanProyekNasional
#EnergiBaruTerbarukan